

Inggris dan Perancis pasca Brexit: Sengketa Jersey sebagai hasil dari *Trade and Cooperation Agreement* (TCA)

Kirana Virajati¹

¹ *International Relations Department, University of Indonesia, Indonesia*

SUBMISSION TRACK

Received : 30 June 2022
Final Revision : 28 August 2022
Available Online : 01 November 2022

KEYWORD

Brexit, economic constructivism, Jersey Dispute, The EU-UK Trade and Cooperation Agreement

KATA KUNCI

Brexit, konstruktivisme ekonomi, The EU-UK Trade and Cooperation Agreement (TCA), Sengketa Jersey

CORRESPONDENCE

Phone : +62 82116758668
e-mail : kiranavirajati@gmail.com

ABSTRACT

Britain's separation from the European Union led to changes that needed to be re-adjusted by both parties. The European Union-United Kingdom Trade and Cooperation Agreement (TCA) is the result of an adjustment between the UK and the European Union, but does not yet involve the financial sector as one of the crucial sectors. In 2021, there was a blockade by French fishermen of the main Jersey port. As Jersey is a part of the Crown's Dependency, the foreign affairs of Jersey are also the responsibility of the UK government. This blockade then invited military ships from Britain and France to secure a situation that increased the intensity between the two countries, coupled with a French bluff to block the British process from entering as an external party in the European Union financial sector. This paper discusses the factors that prompted France to issue this response through an economic constructivism approach that looks at the social aspects of the international political economy phenomenon. Based on the results of the discussion, the driving factors for France's attitude were protests by fishermen, perceptions of changes in Jersey maritime activity regulations, as well as uncertainty arising from the post-Brexit situation and regulations arising from TCA.

ABSTRAK

Berpisahannya Inggris dengan Uni Eropa menimbulkan perubahan-perubahan yang perlu kembali disesuaikan oleh kedua pihak. *The European Union-United Kingdom Trade and Cooperation Agreement* (TCA) merupakan hasil penyesuaian antara Inggris dan Uni Eropa, namun belum melibatkan sektor finansial sebagai salah satu sektor yang krusial. Pada tahun 2021, terjadi blokade yang dilakukan oleh nelayan-nelayan Perancis di pelabuhan utama Jersey. Blokade ini kemudian mengundang kapal militer dari Inggris dan Perancis untuk mengamankan situasi yang meningkatkan intensitas di antara kedua negara, ditambah dengan gertakan Perancis untuk menghalangi proses Inggris untuk masuk sebagai pihak eksternal di sektor finansial Uni Eropa. Jersey merupakan bagian dari Dependensi Kerajaan Inggris sehingga urusan luar negeri Jersey menjadi tanggung jawab dari Pemerintahan Inggris. Tulisan ini mendiskusikan faktor-faktor yang mendorong Perancis untuk mengeluarkan respon tersebut melalui pendekatan konstruktivisme ekonomi yang melihat kepada aspek sosial dari fenomena ekonomi politik internasional. Berdasarkan hasil diskusi, faktor pendorong dari sikap Perancis adalah protes yang dilakukan oleh para nelayan, persepsi terhadap perubahan peraturan aktivitas laut Jersey, serta ketidakpastian yang timbul dari situasi setelah Brexit dan peraturan yang muncul dari TCA.

Pendahuluan

Setelah menjadi anggota dari Uni Eropa selama kurang lebih 40 tahun, Inggris resmi menarik diri dari Uni Eropa pada 31 Januari 2020. Setelah mengalami masa transisi yang diisi dengan proses-proses negosiasi terkait kerjasama di antara kedua belah pihak, Inggris dan Uni Eropa kemudian mencapai kesepakatan terkait kerjasama di antara keduanya di dalam *EU-UK Trade and Cooperation Agreement* (TCA). Meskipun telah ada kesepakatan di antara kedua pihak dan Inggris masih dapat melakukan perdagangan bebas tarif dengan pasar Uni Eropa, tentu ada akses-akses yang tidak dapat dijangkau oleh Inggris karena posisi Inggris yang sudah bukan bagian dari Uni Eropa. Kemudahan-kemudahan pada mobilitas manusia, perdagangan jasa, transportasi udara dan darat, energi, serta akses terhadap program-program Uni Eropa sudah tidak dapat diakses oleh Inggris.¹

Dengan keputusan Inggris untuk menarik diri dari Uni Eropa dianggap akan menimbulkan banyak kerugian bagi Inggris. Inggris juga harus menarik diri dari pasar tunggal Uni Eropa yang merupakan salah satu pasar utama bagi Inggris. Setelah Inggris resmi berpisah dengan Uni Eropa, ekspor Inggris keseluruhan menurun hingga 19.3% dan penurunan impor hingga 21.6%, suatu penurunan yang terakhir dialami oleh Inggris pada tahun 1997.² Tidak dapat dipungkiri bahwa Uni Eropa merupakan partner dagang Inggris yang terbesar dan terdekat, setelah Amerika Serikat dan Tiongkok.

Uni Eropa juga mengalami kerugian-kerugian karena fenomena keluarnya Inggris dari Uni Eropa yang juga disebut sebagai

British Exit (Brexit). Adanya keuntungan yang didapatkan oleh Inggris dan Uni Eropa ketika keduanya masih berada di jalur yang sama mengalami perubahan ketika Inggris sudah tidak lagi menjadi bagian dari Uni Eropa. Uni Eropa yang juga merupakan sebuah organisasi internasional tentu membutuhkan kontribusi dari negara-negara anggotanya dan Inggris pada sebelumnya merupakan salah satu negara penting terkait kontribusi kepada Uni Eropa.³

Salah satu hal yang tidak terdapat di dalam TCA adalah pembahasan mengenai jasa keuangan. Inggris merupakan negara yang kuat dalam sektor keuangan dan jasanya dan memiliki andil sebesar 18% dari keseluruhan pinjaman bank global.⁴ Selain itu, London juga merupakan pusat dari bank-bank asing, dengan sekitar 250 cabang dari bank-bank asing terletak di ibu kota Inggris tersebut.⁵ Jasa-jasa keuangan yang ditawarkan oleh Inggris juga banyak digunakan oleh negara-negara lain, terutama jasa yang berkaitan dengan hukum, akuntansi, konsultasi manajemen, dan pendidikan serta pelatihan jasa-jasa keuangan.⁶ Dari jasa keuangan, Inggris menerima £132 miliar (6.9% dari keseluruhan hasil ekonomi) untuk perekonomiannya pada tahun 2019.⁷ Maka dari itu, sektor keuangan merupakan salah satu kekuatan dari Inggris dan memiliki peranan besar bagi keseluruhan perekonomian negaranya. Jika dilihat dari kekuatan jasa keuangan Inggris, sektor ini menjadi salah satu sektor yang menentukan posisi Inggris di dalam TCA.

³ Gabriel Felbermayr et al., "Economic Effects of Brexit on the European Economy," 4th ed., vol. 01 (Munich, Germany: ifo Institute, 2017), hlm. 1-33.

⁴ "Key Facts about the UK as an International Financial Centre 2018," TheCityUK, October 2018, <https://www.thecityuk.com/research/key-facts-about-the-uk-as-an-international-financial-centre-2018/#:~:text=The%20annual%20Key%20facts%20about,remainder%20generated%20by%20other%20countries>, diakses terakhir pada 2 Juni 2021.

⁵ Ibid.

⁶ Ibid.

⁷ Ibid.

¹ "The EU-UK Trade and Cooperation Agreement," European Commission - European Commission, https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_en, diakses terakhir pada 30 Mei 2022.

² Danica Kirka, "UK Trade with EU Plunges after Brexit, Hurting Economy," *AP NEWS*, 12 Maret 2021, <https://apnews.com/article/brexit-europe-global-trade-coronavirus-pandemic-gross-domestic-product-4cce8c373d7f7d98e6d34cf79daf334b>.

TCA pada tahun 2021 masih dalam proses ratifikasi oleh Uni Eropa dan Inggris dan mulai berjalan efektif sejak Mei 2021. Pada tahun yang sama, terjadi sengketa antara Inggris dan Perancis di wilayah Jersey. Sengketa ini diawali dengan protes yang datang dari nelayan-nelayan Perancis terhadap akses dari kapal nelayan di wilayah Jersey karena hukum baru yang diberlakukan oleh Jersey terhadap kapal nelayan asing yang dianggap membentuk area-area terlarang yang melarang peralatan untuk menangkap ikan yang dapat digunakan.⁸ Penolakan Perancis ini kemudian disertai dengan ancaman untuk menghentikan aliran listrik ke Jersey, dengan 95% kebutuhan listrik Jersey diberikan oleh Perancis. Jersey merupakan wilayah yang memiliki posisi kompleks karena bukan termasuk bagian dari Pemerintahan Inggris, namun tidak bergabung dengan Uni Eropa. Jersey merupakan bagian *Dependensi Kerajaan* (*Crown's dependency*). Dengan posisi Jersey sebagai *Dependensi Kerajaan* dan posisi Pemerintahan Inggris sebagai bagian dari Kerajaan, menjadikan beberapa urusan luar negeri Jersey bagian dari urusan Pemerintahan Inggris.⁹ Salah satu urusan luar negeri Jersey yang menjadi tanggung jawab dari Pemerintahan Inggris adalah urusan pertahanan. Maka dari itu, Inggris mengirimkan kapal patrolinya ketika terjadi blokade yang dilakukan oleh kapal ikan Perancis di pelabuhan utama Jersey.¹⁰

⁸ "Jersey Fishing: What's the Row between UK and France about?," *BBC News*, 6 Mei 2021, <https://www.bbc.com/news/57001584>.

⁹ "Jersey's Relationship with the United Kingdom," States of Jersey, <https://www.gov.je/Government/Departments/JerseyWorld/pages/relationshippeuanduk.aspx#:~:text=and%20Cooperation%20Agreement,%E2%80%8BJersey's%20relationship%20with%20the%20United%20Kingdom,jurisdictions%20over%20hundreds%20of%20years>.

¹⁰ Daniel Boffey, "Explainer: What's behind the UK's Fishing Dispute with France?," *The Irish Times*, 6 Mei 2021 <https://www.irishtimes.com/news/world/uk/explainer-what-s-behind-the-uk-s-fishing-dispute-with-france-1.4557228>.

Respon dari Perancis terhadap pengiriman kapal patrol Inggris pun kemudian diikuti dengan pengiriman kapal patrolinya ke wilayah laut Jersey.

Dengan dilibatkannya militer di dalam sengketa ini, terbentuk tensi di antara Inggris dan Perancis terkait permasalahan ini. Respon keras dari Perancis adalah ancaman terhadap sektor perbankan yang sedang dinegosiasikan oleh Inggris terkait dengan TCA. Pihak dari Perancis mengancam untuk tidak memberikan akses terhadap Inggris untuk sektor-sektor yang diinginkan oleh Inggris di dalam TCA jika tidak menyelesaikan masalah perikanan di wilayah Jersey.¹¹ Reaksi dari Perancis ini terlihat sangat beresiko, melihat kepada posisi Inggris sebagai salah satu sentral keuangan global dengan jasa-jasa dalam sektor keuangan yang kuat. Akses yang diberikan kepada Inggris terutama terhadap sektor keuangan dan jasa keuangan tentu akan membawa keuntungan juga bagi Uni Eropa.

Untuk menempatkan penelitian ini di dalam perkembangan ilmu hubungan internasional, maka dilakukan tinjauan pustaka terhadap penelitian-penelitian terdahulu mengenai isu finansial terkait Brexit dan proses negosiasi dari berpisahnya Inggris dan Uni Eropa sebagai topik-topik yang berkaitan dengan topik utama dari tulisan ini.

Di dalam topik mengenai posisi isu finansial terkait dengan Brexit, terdapat tiga artikel jurnal yang membahas mengenai topik ini. Literatur yang berjudul *Brexit for finance? Structural interdependence as a source of financial political power within UK-EU withdrawal negotiations* melihat aktor-aktor pembentuk kebijakan dari Inggris dan Uni Eropa merupakan salah satu pendorong kuat dalam menentukan pilihan-

¹¹ Tara Patel, "France Threatens U.K. on Financial Services in Fisheries Dispute," *Bloomberg*, 9 Mei 2021, <https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-05-08/france-threatens-u-k-on-financial-services-in-fisheries-dispute>.

pilihan kebijakan di sektor finansial. Tulisan ini juga membahas bahwa Inggris dan Uni Eropa sama-sama menggantungkan kestabilan dan kesejahteraan ekonominya masing-masing kepada perdagangan yang terbuka di dalam jasa keuangan. Akan tetapi, sifat sektor keuangan yang sangat sistemik dan perubahan di dalamnya dapat berdampak kepada sektor lain hingga perekonomian secara keseluruhan, maka tidak ada jaminan bahwa sektor keuangan dapat menjaga preferensi kebijakannya sendiri.¹² Hubungan saling ketergantungan yang kompleks ini merupakan aspek yang tidak dapat luput dari pertimbangan pembentuk-pembentuk kebijakan terkait sektor finansial.

Tulisan yang berjudul *Brexit and the battle for financial services* menempatkan fokus analisis kepada perkembangan kebijakan pasar tunggal dalam sektor keuangan pada konteks Brexit. Terdapat dua skenario yang dapat hadir sebagai hasil dari peraturan sektor keuangan baru di Uni Eropa pasca Brexit. Skenario pertama menggambarkan munculnya kontestasi antara negara-negara anggota Uni Eropa, terutama Jerman dan Perancis, untuk mempromosikan Frankfurt dan Paris sebagai kekuatan sektor finansial baru setelah London.¹³ Di skenario kedua, akan terbentuk suatu mekanisme lintas negara yang akan memberikan keuntungan kepada Inggris karena adanya akses luas terhadap pasar tunggal Uni Eropa.¹⁴ Howarth dan Quaglia di

dalam penelitiannya memiliki kecenderungan bahwa skenario pertama yang akan muncul sebagai hasil dari peraturan sektor keuangan baru di Uni Eropa setelah Inggris memisahkan diri.

Artikel terakhir pada pembahasan mengenai isu finansial dalam konteks Brexit membahas mengenai empat aspek yang mendorong terbentuknya kompetisi di antara Frankfurt dan Paris, sebagai kekuatan finansial baru di Eropa. Lavery, McDaniel, & Schmid menyebutkan keragaman (*diversity*), ketergantungan jalur (*path dependency*), wilayah (*territory*), dan kestabilan peraturan (*regulatory stability*) sebagai aspek-aspek yang membentuk kompetisi antara kedua kekuatan finansial tersebut. Kompetisi ini dapat membentuk perpecahan dalam sektor finansial di Uni Eropa yang juga bisa memunculkan kemungkinan disintegrasi dari Uni Eropa.¹⁵ Maka dari itu, tulisan ini menyarankan untuk penelitian-penelitian terkait Eropa selanjutnya harus melihat kepada hubungan antara politik yang penuh tensi dengan sektor-sektor kapital dan dampaknya kepada aspek-aspek non-finansial.

Topik mengenai proses negosiasi Brexit dibahas di dalam dua artikel. Artikel pertama yang berjudul *Negotiating Brexit: the European Parliament between participation and influence* membahas mengenai kontribusi dari Parlemen Eropa di dalam negosiasi Brexit dengan batasan periode dari Juni 2016 hingga November 2018. Parlemen Eropa sebagai perwakilan dari masyarakat Eropa memiliki fokus kepada hak-hak masyarakat Eropa yang akan terdampak oleh berpisahnya Inggris dari Uni Eropa. Perannya di dalam proses Brexit lebih bersifat informal, atau sebagai *quasi-negotiator*.¹⁶ Untuk hal-hal lainnya, badan-

¹² Manolis Kalaitzake, "Brexit for Finance? Structural Interdependence as a Source of Financial Political Power within UK-EU Withdrawal Negotiations," *Review of International Political Economy* 28, no. 3 (March 6, 2020): hlm. 479-504, <https://doi.org/10.1080/09692290.2020.1734856>.

¹³ David Howarth and Lucia Quaglia, "Brexit and the Battle for Financial Services," *Journal of European Public Policy* 25, no. 8 (April 26, 2018): hlm. 1118-1136, <https://doi.org/10.1080/13501763.2018.1467950>.

¹⁴ Scott Lavery, Sean McDaniel, and Davide Schmid, "Finance Fragmented? Frankfurt and Paris as European Financial Centres after Brexit," *Journal of European Public Policy* 26, no. 10 (October 19, 2018): hlm. 1502-1520, <https://doi.org/10.1080/13501763.2018.1534876>.

¹⁵ Edoardo Bressanelli, Nicola Chelotti, and Wilhelm Lehmann, "Negotiating Brexit: The European Parliament between Participation and Influence," *Journal of European Integration* 41, no. 3 (May 16, 2019): hlm. 347-363, <https://doi.org/10.1080/07036337.2019.1599372>.

¹⁶ Ed Turner et al., "Negotiating as One Europe or Several? the Variable Geometry of the EU's Approach

badan Uni Eropa mengambil peranan yang lebih penting di dalam proses berpisahannya Inggris dengan Uni Eropa.

Artikel terakhir mengenai proses negosiasi Brexit berfokus kepada penentuan kepentingan di dalam Uni Eropa di antara badan supranasional Uni Eropa dan negara-negara anggota, dengan menggunakan isu Brexit sebagai contoh. Berdasarkan tulisan ini, terdapat 4 kelompok aktor yang diteliti sebagai pihak yang paling berpengaruh di dalam Uni Eropa, yaitu Pemerintahan Jerman, Pemerintahan Perancis, Pemerintahan negara-negara Visegrad atau V4 (Republik Ceko, Slovakia, Polandia, dan Hungaria), serta institusi-institusi Uni Eropa. Di dalam isu terkait Brexit, reaksi keras diberikan oleh Jerman dan Perancis terutama terhadap isu perdagangan dan yurisdiksi, sedangkan negara-negara V4 memiliki pandangan yang pragmatis tetapi sangat memegang erat kepada isu-isu terkait keanggotaan Inggris di Uni Eropa. Meskipun terdapat perbedaan di antara posisi negara-negara anggota, namun Uni Eropa tetap dapat menarik suatu posisi bersama sebagai suatu kesatuan dan terdapat peranan penting dari Komisi Eropa sebagai pembentuk agenda di dalam Uni Eropa.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, terlihat bahwa sektor finansial merupakan salah satu sektor yang rumit untuk dinegosiasikan di dalam perjanjian TCA antara Inggris dan Uni Eropa karena hubungan saling ketergantungan yang erat antara kedua pihak dan adanya kontestasi di dalam kota-kota Eropa, Frankfurt dan Paris, sebagai kota pusat finansial baru di Uni Eropa setelah London resmi berpisah. Selain itu, proses negosiasi terkait Brexit juga sangat bergantung kepada keberadaan banyaknya aktor di dalam Uni Eropa, yaitu negara-negara anggota dengan kepentingannya masing-masing dan institusi-institusi Uni Eropa yang memiliki prioritasnya masing-masing. Pembahasan

yang belum terlihat dari penelitian-penelitian sebelumnya adalah pembahasan yang fokus terhadap sikap salah satu aktor negara anggota Uni Eropa di dalam proses berpisahannya Inggris dari Uni Eropa, terutama terkait sektor finansial yang merupakan sektor yang krusial di dalam negosiasi terkait Brexit. Perancis merupakan aktor negara yang akan diteliti karena melihat kepada posisi Paris sebagai kekuatan finansial potensial di Uni Eropa. Penelitian ini akan berusaha mengisi kekosongan melalui suatu penelitian yang melihat motif Perancis dalam memberikan ancaman terhadap Inggris terkait perjanjian finansial pasca Brexit melalui isu sengketa Jersey.

Metodologi

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan positivis, dengan penggunaan kerangka teori sebagai upaya untuk menemukan jawaban dari suatu keputusan yang diambil oleh aktor melalui hubungan sebab-akibat, dalam hal ini adalah Perancis. Metode penelitian dilakukan secara kualitatif dengan tujuan eksplanatori karena penelitian ini berupaya untuk mengelaborasi data dengan teori yang ada melalui pertanyaan penelitian yang mengusung jawaban berupa penyebab dari suatu fenomena.¹⁷ Kerangka pemikiran konstruktivisme juga digunakan dalam isu yang terhitung baru, yaitu sengketa Jersey yang melibatkan Perancis dan Inggris dan baru saja terjadi pada tahun 2021 ini, sehingga penelitian ini juga dilakukan dengan tujuan untuk penggunaan kerangka pemikiran di dalam suatu fenomena yang baru terjadi.

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data yang berasal dari sumber-sumber publik yang dapat diakses melalui internet, dibatasi dengan data-data kualitatif dan data-data kuantitatif

to Brexit,” *Contemporary Social Science* 14, no. 2 (July 11, 2018): hlm. 226-241, <https://doi.org/10.1080/21582041.2018.1492145>.

¹⁷ William Lawrence Neuman, “What Are the Major Types of Social Research?,” in *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (London, United Kingdom: Pearson Education, 2014), hlm. 25-54.

yang dinarasikan dalam bentuk kalimat. Sebagian sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder karena peneliti tidak melakukan pengolahan data-data mentah dan proses pengambilan data langsung dari narasumber. Data yang digunakan dapat berupa berita, dokumen resmi pemerintah, dan laporan-laporan dari badan tertentu yang telah dipilih melalui ketentuan-ketentuan data dari internet yang kredibel untuk menjadi data di dalam penelitian. Dalam proses analisisnya, data-data yang telah dikumpulkan akan dilihat dari pendekatan konstruktivisme untuk mendapatkan makna sosial. Penggunaan data-data yang dikumpulkan diolah dengan penggunaannya sesuai pendekatan konstruktivisme ekonomi.

Pendekatan konstruktivisme memang belum banyak digunakan di dalam menjelaskan fenomena ekonomi politik internasional, namun dapat memberikan penjelasan terhadap beberapa aspek yang tidak mampu untuk dijelaskan oleh perspektif-perspektif aliran utama. Melihat dari fenomena Sengketa Jersey yang terjadi dalam jangka waktu proses ratifikasi TCA dengan sektor finansial yang masih dalam negosiasi antara Inggris dan Uni Eropa, seharusnya Perancis tidak mengambil langkah asertif kepada Jersey, yang urusan pertahanannya merupakan bagian dari tanggung jawab Pemerintahan Inggris. Dari motif ini, terlihat bahwa aspek material tidak hanya menjadi pertimbangan bagi Perancis dalam mengambil sikap. Dengan penekanannya terhadap proses dan nilai-nilai sosial dari hal-hal yang bersifat material, konstruktivisme menjelaskan bahwa negara juga termasuk sebagai aktor sosial dan terikat kepada norma-norma tertentu dan konstruksi institusional yang mencerminkan pandangan dan nilai dari masyarakatnya.¹⁸ Dalam pengambilan keputusannya, ada aspek sosial yang juga memberikan dampak terhadap

suatu kebijakan yang diambil negara selain aspek materialistis perhitungan untung dan rugi. Rawi Abdelal merumuskan tiga asumsi dasar yang berakar dari konstruktivisme untuk melihat sikap Perancis terhadap Inggris melalui tulisan ini, yaitu:

1. Makna

Norma, budaya, dan identitas memberikan aspek sosial terhadap fakta-fakta material. Agen-agen di dalam ekonomi politik internasional, seperti partisipan di dalam pasar, pembentuk kebijakan, dan masyarakat secara keseluruhan tidak hanya mengejar keuntungan yang bersifat materil karena mereka juga terikat dengan tujuan-tujuan sosialnya.¹⁹ Tujuan-tujuan sosial suatu negara biasanya datang dari domestik, terkait dengan norma budaya dan identitas nasional, atau hubungan antara identitas negara dan norma internasional. Identitas nasional dibentuk dari masyarakat domestik suatu negara dan menjadi identitas dari negara tersebut.

2. Persepsi

Persepsi terdiri dari penjelasan mengenai kinerja dunia dan deskripsi terkait realitas sosial. Berbeda dengan makna yang melihat kepada interpretasi agen terhadap dunia, persepsi mendeskripsikan proses pemahaman agen dan narasi dari perubahan material.²⁰

3. Ketidakpastian

Dengan adanya ketidakpastian yang dihadapi oleh suatu agen, menghasilkan keputusan-keputusan yang rasional untuk menyederhanakan ketidakpastian yang menghadirkan beberapa pilihan.²¹ Ide-ide yang bersifat inter-subjektif dapat membantu agen dalam pembentukan kebijakan dan hasil dari pasar. Pandangan ini berbasis kepada ekonomi dunia yang terus-menerus berubah. Maka dari itu, agen-agen dan komunitas yang terlibat membentuk kestabilannya

¹⁹ Mark Blyth and Rawi Abdelal, "Routledge Handbook of International Political Economy (IPE): IPE as a Global Conversation," in *Routledge Handbook of International Political Economy (IPE): IPE as a Global Conversation* (London, United Kingdom: Routledge, 2009), hlm. 62-76.

²⁰ Ibid.

²¹ Ibid.

¹⁸ David N. Balaam and Bradford Dillman, "Alternative Perspectives on International Political Economy," in *Introduction to International Political Economy* (New Jersey, United States: Pearson, 2014), hlm. 101-121.

sendiri dengan mengadopsi nilai, norma, dan perjanjian.

Ketiga asumsi dasar di atas disadur dari pembahasan Rawi Abdelal mengenai pendekatan konstruktivisme terhadap fenomena-fenomena ekonomi politik internasional. Pendekatan konstruktivisme ini sebenarnya lebih dilihat sebagai suatu bahasa analisa dibandingkan sebagai pisau analisis dalam memahami suatu fenomena ekonomi politik internasional. Meskipun sangat menekankan terhadap aspek-aspek sosial, namun konstruktivisme tetap melihat aspek-aspek material sebagai suatu hal yang penting di dalam ekonomi politik internasional. Maka dari itu, konstruktivisme melihat bahwa satu pendekatan saja tidak mampu untuk menjelaskan fenomena ekonomi politik internasional yang sebenarnya sangat kompleks.

Hasil Diskusi

Sektor Perikanan dan wilayah Jersey bagi Perancis

Sektor perikanan merupakan salah satu sektor yang menjadi perhatian bagi perekonomian Perancis. Dengan jumlah kapal penangkap ikan sebanyak 7.811 unit dan 3.438 dari kapal tersebut berlayar di laut luar negeri, penyediaan kerja terhadap 13.540 individu, sektor ini berperan dalam menyerap angka tenaga kerja.²² Selain itu, konsumsi produk laut di Perancis mencapai angka 33,7 kilogram perkapita yang dilakukan oleh rumah tangga, restoran, dan catering.²³ Pada tahun 2018, Perancis memproduksi sebanyak 0.8 juta ton ikan (termasuk krustasea dan moluska) yang bernilai 2323.5 juta USD, dengan hasil tangkapan laut sebesar 64%.²⁴ Pemerintah

Perancis memberikan dukungan penuh terhadap sektor perikanan melalui pendanaan sebesar £3.4 juta untuk jasa di sektor perikanan, meliputi salah satunya akses dan manajemen pelabuhan.²⁵ Perancis selama ini merupakan importer dari ikan dan produk-produk ikan, terlihat dari penurunan ekspor dalam periode 2008 hingga 2018 sebesar 11% dan peningkatan impor dalam periode yang sama sebesar 15%.²⁶ Hal ini menunjukkan bahwa sektor perikanan bukanlah sektor terkuat dari perekonomian Perancis, namun tetap menerima perhatian dari pemerintah melalui pendanaan yang diberikan.

Dalam melakukan aktivitasnya, nelayan-nelayan yang berasal dari Perancis memiliki empat wilayah utama, yaitu Laut Mediterania, Teluk Biscay, Laut Utara, dan Laut Celtic. Laut Celtic ini meliputi Jalur Inggris, yang merupakan wilayah dari Jersey. 250 kapal ikan Perancis melakukan aktivitasnya di sekitar Pulau Jersey, karena jarak dari pantai Perancis ke wilayah Jalur Inggris yang hanya sejauh 19 kilometer.²⁷ Isu ini merupakan salah satu pembahasan di dalam negosiasi Brexit, bahwa nelayan Perancis yang sering melakukan aktivitas penangkapannya di wilayah laut Jersey dapat tetap melakukan aktivitasnya, namun diperlukan lisensi baru dari Pemerintah Jersey.²⁸ Para nelayan ini telah mendapatkan izin dari Pemerintah Jersey untuk melakukan aktivitasnya dan menangkap dari wilayah Jalur Inggris, namun terdapat beberapa peraturan dan pembatasan yang diberikan melalui izin ini yang sebelumnya tidak

2021 - OECD,” OECD, January 2021, https://www.oecd.org/agriculture/topics/fisheries-and-aquaculture/documents/report_cn_fish_fra.pdf.

²⁵ Ibid.

²⁶ Ibid.

²⁷ “Explained: Why Are French Fishermen so Angry about Jersey’s Post-Brexit Fishing Licences?,” *The Local France*, 6 Mei 2021, <https://www.thelocal.fr/20210506/why-are-french-fishermen-so-angry-about-jerseys-post-brexit-fishing-licences/>.

²⁸ Ibid.

²² “The Fisheries and Aquaculture Sector in France (2020),” FranceAgriMer, 2020, <https://www.franceagrimer.fr/fam/content/download/65441/document/CC%20p%C3%A4che%20aqua%20ANG%20web.pdf?version=1>.

²³ Ibid.

²⁴ “Fisheries and Aquaculture in France January

dibahas di dalam perjanjian.²⁹ Maka dari itu, timbul protes dari para nelayan karena adanya inkonsistensi dari peraturan terkait penangkapan ikan yang diberlakukan oleh Pemerintah Jersey.

Sikap protes yang dilayangkan oleh nelayan-nelayan dari Perancis kemudian diikuti dengan aksi blokade yang dilakukan oleh kapal-kapal ikan Perancis, dengan jumlah kurang lebih sekitar 100 kapal yang berada di sekitar pelabuhan utama Jersey. Sebelumnya, nelayan-nelayan Perancis juga pernah melakukan blokade terhadap beberapa pelabuhan, yaitu, Calais, Boulogne, dan Dunkirk pada tahun 2009 sebagai protes terhadap kuota yang ditetapkan oleh Uni Eropa.³⁰

Masyarakat Perancis sering melakukan protes di ranah publik dengan melakukan blokade terhadap akses-akses utama dalam mengutarakan aspirasinya, seperti misalnya gerakan *Yellow Vests* yang mengutarakan pelawanan pelajar dan petani terhadap kapitalisme dan nilai-nilai konservatif. Terdapat suatu budaya untuk melakukan protes di dalam masyarakat yang berakar dari Revolusi Perancis tahun 1789 dan untuk masa sekarang, protes-protes tersebut lebih mudah membawa dampak di dalam pemerintah karena bentuk dari parlemen Perancis yang terdiri dari sembilan partai yang berbeda di dalam Majelis Nasional.³¹ Meskipun protes yang dilaksanakan tidak selalu berhasil, namun dari beberapa peristiwa yang disebutkan terlihat bahwa masyarakat sebagai agen menggunakan budaya protes melalui sebuah gerakan yang telah berakar di masyarakat sejak adanya Revolusi Perancis. Protes-protes yang dilakukan ini kemudian masuk

ke dalam parlemen Perancis yang beragam, sehingga memiliki peluang yang besar untuk didengar oleh pemerintah untuk kemudian diproses sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan.

Terkait dengan sikap Perancis yang memberikan ancaman untuk memberikan pembalasan terhadap Inggris melalui sektor jasa keuangan yang sedang dinegosiasikan oleh Inggris dan Uni Eropa, terdapat fakta material yang dilihat dari potensi Paris untuk menjadi kota pusat keuangan baru dari Uni Eropa. Akan tetapi, fakta sosial yang perlu diperhatikan bahwa Pemerintahan Perancis sedang melakukan tindakan setelah mendengar protes yang disalurkan oleh nelayan-nelayannya, meskipun protes tersebut dilayangkan kepada Pemerintahan Jersey. Tujuan sosial yang ingin dicapai oleh Perancis adalah keinginan untuk mengusahakan keberlangsungan hidup dari nelayan-nelayannya.

Suatu hal terkait identitas yang juga perlu diperhatikan antara Inggris dan Perancis adalah posisi keduanya ketika berada di dalam Uni Eropa. Menarik kepada aspek sejarah, ketika Inggris hendak bergabung ke dalam Uni Eropa pada tahun 1973, Inggris mendapatkan veto dua kali dari Perancis melalui keputusan Presiden Charles De Gaulle dengan alasan Europe Economic Community (EEC) bertentangan dengan perekonomian Inggris dan bergabungnya Inggris dapat mengganggu proses EEC yang sudah solid.³² Terlepas dari alasan tersebut, Perancis merupakan salah satu negara yang memimpin proses-proses di dalam pembentukan EEC dan seringkali disebut sebagai negara yang memiliki pengaruh besar di dalamnya, maka dengan bergabungnya Inggris sebagai salah satu kekuatan yang juga besar di kawasan Eropa akan melawan dominasi Perancis di dalam EEC. Jika ditarik ke aspek sejarah yang lebih dalam lagi, Inggris dan Perancis merupakan

²⁹ Ibid.

³⁰ James Meikle, "French Fishermen Continue to Blockade Channel Ports," *The Guardian*, 15 April 2019, <https://www.theguardian.com/world/2009/apr/15/french-fishermen-blockade-ports>.

³¹ Ciara Nugent, "Why French Protests Are More Successful than American Ones," *Time*, 12 Desember 2018, <https://time.com/5476534/french-protests-successful-macron/>.

³² Nesta Roberts, "Emphatic 'No' by De Gaulle," *The Guardian*, 28 November 1967, <https://www.theguardian.com/world/1967/nov/28/eu.france>.

dua negara yang sering terlibat perang di wilayah Eropa. Dari Perang Agincourt pada tahun 1415 hingga ke Perang Dunia I yang melibatkan ketidakpercayaan dari Inggris terhadap Perancis sehingga berujung kepada pemutusan hubungan diplomatik antara keduanya, kemudian berlanjut kepada awal pembentukan Uni Eropa, kedua negara ini seperti tetangga yang banyak terlibat perseteruan dan persaingan, namun tetap memiliki kedekatan dalam beberapa aspek tertentu.³³ Di antara Inggris dan Perancis, terlihat hubungan yang bersifat rivalitas di antara keduanya, terutama berkaitan dengan dominasi pengaruh di wilayah sekitar Eropa.

Persepsi Perancis terhadap Izin Melaut di Wilayah Jersey

Seperti yang sudah disebutkan pada bagian sebelumnya, bahwa nelayan-nelayan yang hidup di pesisir Perancis hanya berjarak 19 kilometer dari wilayah Jalur Inggris dan ketika Inggris masih menjadi bagian dari Uni Eropa, nelayan-nelayan Perancis dapat melaut di wilayah tersebut dan sudah menjadi bagian dari aktivitas kehidupan sehari-harinya. Aktivitas penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan-nelayan Perancis di Laut Jersey berkaitan dengan keuntungan geografis. Meskipun Jersey bukan bagian teritorial dari Inggris, namun beberapa keputusan luar negeri Jersey merupakan tanggung jawab dari Inggris. Pada awalnya, perjanjian Brexit terkait isu ini sudah sampai kepada kesepakatan bahwa nelayan-nelayan yang melaut di wilayah Jersey dapat tetap melakukan aktivitasnya, namun harus memiliki izin yang diberikan oleh Pemerintahan Jersey. Nelayan-nelayan dari Perancis sudah sepakat dengan syarat ini. Akan tetapi, ketika izin dikeluarkan untuk kapal-kapal ikan tersebut, muncul

beberapa peraturan dan pembatasan yang sebelumnya tidak muncul di dalam perjanjian.

Salah satu peraturan yang paling berdampak bagi nelayan Perancis adalah peraturan durasi keberadaan kapal ikan Perancis di Lautan Jersey. Seperti kapal *Cap Lihou* yang berdasarkan peraturan baru hanya dapat menangkap ikan di Laut Jersey selama 22 hari dalam satu tahun, padahal sebelumnya diberikan sekurang-kurangnya 100 hari pada tahun-tahun tertentu.³⁴ Padahal bagi kapten dari kapal ini, melaut tidak hanya berperan sebagai mata pencaharian, namun juga termasuk sebagai tradisi yang sudah berjalan di dalam keluarganya selama bertahun-tahun. Tidak hanya kapten dari kapal ini yang merasa bahwa melaut lebih dari sekedar untuk memenuhi kebutuhan finansial mereka karena ada tradisi sosial yang ingin mereka jaga.

Dalam melihat perubahan narasi ini, nelayan-nelayan Perancis melihat peraturan dan pembatasan izin melaut sebagai ancaman bagi keberlangsungan hidupnya. Dengan kurangnya hasil tangkapan yang didapatkan, nelayan-nelayan ini terancam mengalami pengurangan pemasukan. Nelayan-nelayan muda yang baru akan mulai melaut pun khawatir karena modal yang telah diberikan untuk membeli dan mengoperasikan kapal terancam untuk tidak kembali karena adanya pembatasan-pembatasan melalui izin melaut ini.³⁵ Terlebih lagi, izin yang diberikan oleh Pemerintah Jersey merupakan izin kepada kapten kapal, bukan memberikan izin kepada kapal, sehingga kapal-kapal baru tidak mendapatkan izin sama sekali untuk masuk ke wilayah laut Jersey.³⁶ Maka dari itu, mereka menunjukkan penolakannya terhadap

³³ Karine Varley, "Brexit: France and UK Have Long and Troubled History – but Pragmatism Offers a Bright Future," *The Conversation*, 17 September 2019, <https://theconversation.com/brexit-france-and-uk-have-long-and-troubled-history-but-pragmatism-offers-a-bright-future-123495>.

³⁴ Helen-Ann Smith, "Post-Brexit Fish Fight: Jersey Isn't Backing down and French Are Retaliating," *Sky News*, 13 Mei 2021, <https://news.sky.com/story/post-brexit-fish-fight-jersey-isnt-backing-down-and-french-are-retaliating-12304437>.

³⁵ "Explained: Why Are French Fishermen so Angry about Jersey's Post-Brexit Fishing Licences?"

³⁶ "Post-Brexit Fish Fight: Jersey Isn't Backing down and French Are Retaliating."

izin ini melalui blokade, karena selain kerugian ekonomi yang mereka hadapi, nelayan-nelayan Perancis terutama dari Norman dan Breton juga menarasikan perubahan peraturan yang diberlakukan oleh Jersey ini akan berdampak kepada tradisi keluarga mereka yang sudah dijalankan sejak generasi-generasi sebelum mereka.

Perubahan material yang terjadi adalah adanya peraturan-peraturan yang membatasi nelayan-nelayan Perancis untuk melakukan aktivitas penangkapan ikan oleh Pemerintah Jersey. Perancis melihat bahwa perubahan ini akan berdampak kepada kehidupan dari nelayan-nelayannya yang berlaut di wilayah Jersey, juga sebagai upaya untuk menghalangi pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dari masyarakatnya yang sudah lama bergantung kepada hasil tangkapan laut dari wilayah Jersey. Maka respon pertama kali yang muncul dari Pemerintah Perancis adalah ancaman untuk memutus pasokan aliran listrik dari Perancis ke Jersey karena 95% dari wilayah Jersey menggunakan listrik dari kabel bawah laut yang bersumber dari Perancis, sebagai bentuk untuk menghalangi pemenuhan kebutuhan dari masyarakat Jersey yang juga bergantung kepada listrik dari Perancis.

Perjanjian pasca Brexit yang membawa perubahan peraturan di Jersey ini dilihat oleh Perancis akan membawa kerugian bagi sektor perikanannya. Respon keras yang diberikan Perancis untuk menghalangi Inggris dalam mengakses pasar tunggal Uni Eropa terutama terkait sektor finansial dan jasanya merupakan suatu upaya untuk menghalangi Inggris untuk menerima keuntungan dari pasar tunggal Uni Eropa setelah memutuskan untuk berpisah. Sebagai salah satu negara yang memiliki pengaruh kuat di dalam Uni Eropa, respon keras yang diberikan oleh Perancis ini dapat muncul karena ketika Inggris sudah tidak menjadi bagian dari Uni Eropa lagi, ada keuntungan-keuntungan yang seharusnya sudah tidak didapatkan oleh Inggris karena posisinya sekarang yang sudah menjadi pihak eksternal dari Uni Eropa.

Ketidakpastian yang dihadapi Perancis

Peraturan yang merupakan hasil dari TCA ini sudah diimplementasikan oleh Jersey dengan amandemen yang dilakukan terhadap peraturan perikanan, terutama lisensi dari kapal-kapal ikan. Di dalam perubahan ini, disebutkan bahwa Jersey akan menjadi pihak yang mengontrol aktivitas kapal-kapal Uni Eropa di perairan Jersey, termasuk kapal-kapal yang berasal dari Perancis. Dengan adanya peraturan yang mengancam kepada keberlangsungan dari aktivitas yang memenuhi kebutuhan mereka, para nelayan Perancis dihadapkan dengan situasi yang tidak pasti. Hal ini juga dapat dilihat dari pihak Jersey yang tidak akan mundur dengan peraturan-peraturan yang telah masuk sebagai amandemen bagi undang-undang mereka dan adanya pembalasan dari Pemerintah Perancis berupa gertakan untuk memutuskan pasokan aliran listrik dari kabel bawah laut kepada Jersey.³⁷

Adanya peningkatan tensi di antara pemerintahan Inggris dan pemerintahan Perancis terkait isu ini juga semakin memberikan situasi yang tidak pasti bagi nelayan-nelayan Perancis. Kepastian untuk dapat kembali melaut dengan regulasi sebelum Brexit juga tidak dapat ditentukan dalam waktu dekat. Terlalu banyak kemungkinan yang dapat menjadi jawaban dari ketidakpastian yang tengah dihadapi para nelayan ini, sehingga sikap yang diambil adalah dengan menunjukkan protesnya melalui aksi blokade terhadap pelabuhan utama Jersey.

Perancis juga dihadapkan kepada situasi ketidakpastian yang melibatkan keberlangsungan dari hidup nelayan-nelayannya. Tidak hanya ketidakpastian yang

³⁷ "French Boats Retreat from Jersey but Warn 'next Time Will Be War' after UK Warships Called to Blockade," *news.com*, 7 Mei 2021, <https://www.news.com.au/technology/innovation/military/french-boats-retreat-from-jersey-but-warn-next-time-will-be-war-after-uk-warships-called-to-blockade/news-story/9f165281dc117a56e840b0eda10c8754>.

bersumber dari keputusan selanjutnya dari Pemerintahan Jersey, namun juga terhadap ketidakpastian dari sektor perikanan hasil tangkapan laut untuk masa selanjutnya. Perjanjian pasca Brexit ini tentu akan berlaku untuk jangka panjang dan tidak akan mudah untuk diubah dan adanya kerugian yang dirasakan oleh sektor perikanan Perancis akan menimbulkan rasa tidak aman dari Perancis terkait sektor-sektor lainnya, termasuk sektor keuangan. Ketika Inggris dapat masuk di dalam pasar tunggal Uni Eropa yang mengharuskan penyesuaian regulasi-regulasi di dalam Uni Eropa, tidak menutup kerugian akan dirasakan oleh Perancis, terutama melihat dari posisi Paris sebagai salah satu kekuatan keuangan potensial setelah London. Ketika Inggris tidak dapat masuk ke dalam pasar tunggal Uni Eropa sebagai pihak eksternal terutama dalam sektor finansial, maka Paris dapat melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan potensinya sebagai kekuatan finansial baru dari Uni Eropa. Maka dari itu, Perancis mengeluarkan respon keras terhadap Inggris, melalui ancaman kepada perjanjian sektor finansial di pasar tunggal, untuk menyelesaikan sengketa Jersey ini sebagai salah satu upaya untuk memberikan rasa aman.

Ancaman Perancis melalui Sektor Finansial terhadap Inggris

London merupakan pusat sektor finansial global, dengan Inggris sebagai negara yang memberikan tawaran terbesar melalui jasa sektor finansialnya. Uni Eropa tentunya memiliki alasan untuk tetap memberikan akses bagi Inggris terhadap pasar tunggal Uni Eropa dalam sektor finansial. Selain itu, sektor finansial yang bersifat sangat cair, dengan kekuatannya untuk bisa memberikan dampak kepada sektor-sektor di luar finansial, menjadikan Uni Eropa tetap perlu untuk memiliki kekuatan finansial global di dalamnya. Akan sangat menguntungkan bagi Uni Eropa jika tetap memberikan akses pasar tunggalnya di dalam sektor finansial dari

Inggris dan membuka pasar jasa untuk melibatkan masuknya jasa-jasa keuangan dari Inggris yang sudah banyak diakui sebagai jasa-jasa keuangan professional.

Melihat dari pemaparan pada bagian-bagian sebelumnya, dapat dilihat bahwa Perancis memiliki nilai-nilai sosial yang mendasari keputusannya untuk memberikan ancaman terhadap Inggris terkait sektor finansial karena jika hanya berdasarkan kepada perhitungan untung dan rugi, seharusnya Perancis tidak mengambil reaksi yang keras dengan mengancam terhadap sektor finansial. Dari perspektif konstruktivisme ekonomi, ada tiga hal yang dilihat yaitu makna, persepsi, dan ketidakpastian.

Berdasarkan makna, tidak hanya pemaknaan dari negara saja yang dilihat namun juga pemaknaan dari nelayan-nelayan Perancis sebagai pihak yang terdampak langsung oleh peraturan menangkap laut di wilayah Jersey. Respon keras dari nelayan Perancis melalui aksi blokade yang dilakukan dengan kapal-kapal nelayan Norman dan Breton merupakan salah satu norma yang sudah mengakar di dalam masyarakat Perancis. Spirit dari masyarakat Perancis untuk melakukan protes terhadap keputusan-keputusan yang merugikan sebagian besar dari masyarakat merupakan warisan dari Revolusi Perancis, sehingga masyarakat Perancis terbiasa untuk menyuarakan pendapatnya terhadap pihak yang memiliki otoritas, yaitu pemerintah. Meskipun dalam isu ini nelayan tidak melakukan protes kepada Pemerintahan Perancis secara langsung, namun Pemerintahan Perancis tetap mendengar dan melakukan usaha yang mendukung kepentingan nelayan-nelayannya, dengan gertakan untuk membalas melalui pemutusan aliran listrik kepada Jersey.

Pemerintah Perancis juga memiliki pemaknaannya sendiri terhadap Inggris. Identitas Inggris sebagai negara tetangganya secara geografis dan adanya aspek sejarah yang melatarbelakangi hubungan antara keduanya menjadikan Perancis memiliki

sikap yang cukup keras terhadap Inggris di dalam isu ini. Inggris merupakan salah satu negara yang menjadi rival dari Perancis untuk memiliki pengaruh di wilayah Eropa. Melihat juga dari perubahan peraturan melaut di Jersey yang merupakan hasil dari TCA yang disebabkan oleh terjadinya Brexit dapat membentuk identitas Inggris di dalam Perancis sebagai negara yang menyebabkan kerugian, baik bagi Uni Eropa maupun bagi Perancis sendiri.

Adanya perubahan peraturan aktivitas laut yang diberlakukan oleh Pemerintahan Jersey muncul sebagai ancaman bagi keberlangsungan hidup dari nelayan-nelayan Perancis yang telah menggantungkan hidupnya kepada hasil tangkapan dari Laut Jersey. Dengan interpretasi peraturan ini sebagai suatu ancaman, maka muncul reaksi yang keras berupa blokade sebagai respon terhadap ancaman bagi kehidupannya. Pemerintahan Perancis juga menginterpretasikan hukum ini sebagai upaya untuk mengganggu keberlangsungan hidup dari nelayan-nelayannya, maka dari itu respon langsung yang diberikan juga dalam bentuk upaya mengganggu keberlangsungan hidup masyarakat Jersey, yakni ancaman untuk memutus aliran listrik dari Perancis yang menghidupi 95% kebutuhan listrik dari Jersey.

Ketidakpastian, merupakan suatu kondisi yang dialami oleh Perancis dan nelayan-nelayannya. Dengan dihadapkan kepada ketidakpastian ini maka muncul suatu keputusan rasional yang berusaha untuk menyederhanakan segala rupa kemungkinan bagi para pengambil kepentingan. Situasi ketidakpastian yang dihadapi adalah pemberlakuan peraturan baru oleh Pemerintah Jersey yang menjadi salah satu hasil yang dirundingkan di dalam TCA. Para nelayan menghadapi situasi ketidakpastian ini dengan melakukan blokade, sedangkan Pemerintahan Perancis menghadapinya dengan memberikan reaksi yang keras kepada Jersey, melalui pemutusan aliran listrik, dan Inggris, melalui ancaman terhadap akses pasar tunggal Uni Eropa

terutama di sektor finansial. Kedua keputusan ini merupakan upaya yang diambil oleh Perancis dan nelayan-nelayannya untuk memiliki rasa aman di tengah ketidakpastian yang tengah dihadapi.

Ancaman yang diberikan oleh Perancis terhadap Inggris melalui akses Inggris kepada pasar tunggal Uni Eropa di sektor finansial memiliki tujuan-tujuan sosial yang mendukung. Meskipun keberadaan Inggris di pasar tunggal sebenarnya akan menguntungkan sektor finansial Uni Eropa, namun Perancis tetap memberikan reaksi keras yang dapat berujung kepada keputusan Inggris untuk tidak menegosiasikan peraturan terkait aktivitas lautnya dengan Pemerintahan Jersey dan Inggris tidak akan masuk di dalam pasar tunggal Uni Eropa. Secara rasional, gertakan ini sebenarnya dapat berujung merugikan Perancis dan Uni Eropa. Akan tetapi, melihat dari sisi lain, tidak hanya insentif material yang berusaha untuk dilindungi oleh Perancis karena ada tujuan-tujuan sosial yang muncul dari makna, persepsi, dan ketidakpastian. Ketiga aspek ini bukan menjadi pendorong utama dari keputusan Perancis karena aspek-aspek material masih menjadi pendorong dominan di dalam keputusan, terutama keputusan ekonomi. Ketiga aspek ini merupakan pelengkap dari aspek-aspek material yang menjadi pertimbangan utama dari keputusan yang diambil oleh Perancis.

Kesimpulan

Berpisahannya Inggris dari Uni Eropa mengharuskan kedua pihak untuk melalui proses negosiasi yang cukup panjang karena kasus Inggris merupakan kasus pertama negara keluar dari Uni Eropa. Inggris dan Uni Eropa kemudian mencapai kesepakatan di dalam *Trade and Cooperation Agreement* (TCA). Salah satu hal yang belum menjadi pembahasan adalah sektor keuangan, yang merupakan sektor terkuat dari perekonomian Inggris. Pada tahun 2021, terjadi sengketa Jersey yang melibatkan nelayan-nelayan Perancis dengan Pemerintahan Jersey yang

menerapkan perubahan di dalam peraturan wilayahnya terkait aktivitas laut. Protes yang dilakukan oleh nelayan-nelayan Perancis adalah dengan melakukan blokade akses terhadap pelabuhan utama Jersey, yang kemudian direspon oleh Pemerintah Inggris untuk mengirimkan dua unit kapal patrolinya. Pengiriman kapal ini kemudian direspon oleh Pemerintah Perancis, yang juga mengirimkan dua unit kapal patrolinya ke wilayah Laut Jersey. Terjadi eskalasi tensi di antara kedua negara, hingga Perancis mengancam akan menghalangi Inggris untuk masuk ke dalam sektor-sektor lain di pasar tunggal Uni Eropa, terutama sektor finansial.

Jika dilihat secara rasional, Perancis seharusnya tidak memberikan respon yang keras terhadap Inggris karena pentingnya sektor finansial Inggris bagi Uni Eropa. Maka dari itu, dalam melihat isu ini digunakan pendekatan konstruktivisme ekonomi untuk melihat tujuan-tujuan sosial yang mendasari keputusan Perancis. Tiga basis dari konstruktivisme untuk melihat fenomena ini adalah makna, persepsi, dan ketidakpastian. Berdasarkan makna, nilai-nilai yang mendukung terjadinya blokade adalah bentuk protes yang sudah mengakar di dalam masyarakat Perancis yang kemudian didengar oleh Pemerintahan Perancis. Respon yang diberikan oleh Pemerintahan Perancis terhadap Inggris merupakan bentuk dari pembentukan identitas Inggris sebagai rivalnya di wilayah Eropa. Persepsi terhadap peraturan yang diberlakukan oleh Jersey dari nelayan-nelayan Perancis dan pemerintahannya adalah persepsi ancaman terhadap keberlangsungan hidup dan kesejahteraan dari para nelayan yang merupakan bagian dari masyarakat Perancis. Ketidakpastian yang dihadapi oleh Perancis dan nelayan-nelayannya adalah perubahan peraturan terkait aktivitas laut oleh Pemerintahan Jersey, yang kemudian mengundang reaksi-reaksi kuat dari keduanya sebagai bentuk untuk mencari rasa aman terkait situasi yang

tidak pasti ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Balaam, David N., and Bradford Dillman. "Alternative Perspectives on International Political Economy." Essay. In *Introduction to International Political Economy*, 101–21. New Jersey, United States: Pearson, 2014.
- Blyth, Mark, and Rawi Abdelal. "Routledge Handbook of International Political Economy (IPE): IPE as a Global Conversation." Essay. In *Routledge Handbook of International Political Economy (IPE): IPE as a Global Conversation*, 62–76. London, United Kingdom: Routledge, 2009.
- Boffey, Daniel. "Explainer: What's behind the UK's Fishing Dispute with France?" *The Irish Times*. The Irish Times, May 6, 2021. <https://www.irishtimes.com/news/world/uk/explainer-what-s-behind-the-uk-s-fishing-dispute-with-france-1.4557228>.
- Bressanelli, Edoardo, Nicola Chelotti, and Wilhelm Lehmann. "Negotiating Brexit: The European Parliament between Participation and Influence." *Journal of European Integration* 41, no. 3 (May 16, 2019): 347–63. <https://doi.org/10.1080/07036337.2019.1599372>.
- "The EU-UK Trade and Cooperation Agreement." European Commission - European Commission, August 19, 2021. https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_en.
- Felbermayr, Gabriel, Clemens Fuest, Jasmin Katrin Gröschl, and Daniel Stöhlker. Rep. *Economic Effects of Brexit on the European Economy* 01. 4th ed. Vol. 01. Munich, Germany: ifo Institute, 2017.
- "Fisheries and Aquaculture in France January 2021 - OECD." OECD, January 2021. https://www.oecd.org/agriculture/topics/fisheries-and-aquaculture/documents/report_cn_fish_fra.pdf.
- "The Fisheries and Aquaculture Sector in France (2020)." FranceAgriMer, 2020. <https://www.franceagrimer.fr/fam/content/download/65441/document/CC%20p%C3%AAche%20aqua%20ANG%20web.pdf?version=1>.
- "French Boats Retreat from Jersey but Warn 'next Time Will Be War' after UK Warships Called to Blockade." *news.com*. *news.com.au* - Australia's leading news site, May 7, 2021. <https://www.news.com.au/technology/innovation/military/french-boats-retreat-from-jersey-but-warn-next-time-will-be-war-after-uk-warships-called-to-blockade/news-story/9f165281dc117a56e840b0eda10c8754>.
- Howarth, David, and Lucia Quaglia. "Brexit and the Battle for Financial Services." *Journal of European Public Policy* 25, no. 8 (April 26, 2018): 1118–36. <https://doi.org/10.1080/13501763.2018.1467950>.
- "Jersey Fishing: What's the Row between UK and France about?" BBC News. BBC, May 6, 2021. <https://www.bbc.com/news/57001584>.
- Kalaitzake, Manolis. "Brexit for Finance? Structural Interdependence as a Source of Financial Political Power within UK-EU Withdrawal Negotiations." *Review of International Political Economy* 28, no. 3 (March 6, 2020): 479–504. <https://doi.org/10.1080/09692290.2020.1734856>.
- "Key Facts about the UK as an International Financial Centre 2018." TheCityUK, October 2018. <https://www.thecityuk.com/research/key-facts-about-the-uk-as-an-international-financial-centre-2018/#:~:text=The%20annual%20Key%20facts%20about,remainder%20generated%20by%20other%20countries>.

- Kirka, Danica. "UK Trade with EU Plunges after Brexit, Hurting Economy." AP NEWS. Associated Press, March 12, 2021. <https://apnews.com/article/brexit-europe-global-trade-coronavirus-pandemic-gross-domestic-product-4cce8c373d7f7d98e6d34cf79daf334b>.
- Lavery, Scott, Sean McDaniel, and Davide Schmid. "Finance Fragmented? Frankfurt and Paris as European Financial Centres after Brexit." *Journal of European Public Policy* 26, no. 10 (October 19, 2018): 1502–20. <https://doi.org/10.1080/13501763.2018.1534876>.
- Meikle, James. "French Fishermen Continue to Blockade Channel Ports." The Guardian. Guardian News and Media, April 15, 2009. <https://www.theguardian.com/world/2009/apr/15/french-fishermen-blockade-ports>.
- Neuman, William Lawrence. "What Are the Major Types of Social Research?" Essay. In *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*, 25–54. London, United Kingdom: Pearson Education, 2014.
- Nugent, Ciara. "Why French Protests Are More Successful than American Ones." Time. Time, December 12, 2018. <https://time.com/5476534/french-protests-successful-macron/>.
- Patel, Tara. "France Threatens U.K. on Financial Services in Fisheries Dispute." Bloomberg. Bloomberg, May 9, 2021. <https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-05-08/france-threatens-u-k-on-financial-services-in-fisheries-dispute>.
- Roberts, Nesta. "Emphatic 'No' by De Gaulle." The Guardian. Guardian News and Media, November 28, 1967. <https://www.theguardian.com/world/1967/nov/28/eu.france>.
- Smith, Helen-Ann. "Post-Brexit Fish Fight: Jersey Isn't Backing down and French Are Retaliating." Sky News. Sky, May 13, 2021. <https://news.sky.com/story/post-brexit-fish-fight-jersey-isnt-backing-down-and-french-are-retaliating-12304437>.
- "Explained: Why Are French Fishermen so Angry about Jersey's Post-Brexit Fishing Licences?" The Local France, May 6, 2021. <https://www.thelocal.fr/20210506/why-are-french-fishermen-so-angry-about-jerseys-post-brexit-fishing-licences/>.
- Turner, Ed, Andrew Glencross, Vladimir Bilcik, and Simon Green. "Negotiating as One Europe or Several? the Variable Geometry of the EU's Approach to Brexit." *Contemporary Social Science* 14, no. 2 (July 11, 2018): 226–41. <https://doi.org/10.1080/21582041.2018.1492145>.
- Varley, Karine. "Brexit: France and UK Have Long and Troubled History – but Pragmatism Offers a Bright Future." The Conversation, September 17, 2019. <https://theconversation.com/brexit-france-and-uk-have-long-and-troubled-history-but-pragmatism-offers-a-bright-future-123495>